

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Pekanbaru

Kessy Silsilia¹, ²Hasim As'ari

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau
e-mail: kessy.silsilia5712@student.unri.ac.id

Abstrak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat. Namun, dalam implementasinya di tingkat daerah masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam orang informan yang terdiri atas unsur pelaksana program dan masyarakat penerima bantuan. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru pada umumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan besaran anggaran bantuan, jumlah tenaga pendamping yang belum memadai, potensi kecemburuan sosial akibat terbatasnya kuota penerima bantuan, serta pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas implementasi program.

Kata Kunci: : Implementasi Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Kota Pekanbaru

Abstract

The Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) is a government policy aimed at improving the quality of substandard housing for low-income communities through an approach based on community empowerment and self-help. However, its implementation at the local level still faces various challenges that could hinder the achievement of the program's objectives, such as limited resources, coordination issues among implementers, and the

socioeconomic conditions of the community. This study aims to analyze the implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in Pekanbaru City and to identify the factors that act as barriers to its implementation. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation involving six informants, consisting of program implementers and beneficiaries. The research analysis draws on Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which comprises six indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, implementers' dispositions, and the social, economic, and political environment. The results indicate that the implementation of the BSPS Program in Pekanbaru City has generally proceeded in accordance with the mechanisms and technical guidelines established by the government. However, implementation has not been optimal due to several constraints, including limited aid budgets, an insufficient number of field staff, the potential for social jealousy resulting from limited aid recipient quotas, and the influence of the community's social, economic, and political conditions, which also affect the program's implementation effectiveness.

Keywords : Program Implementation, Self-Help Housing Stimulus Assistance, Pekanbaru City

LATAR BELAKANG

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap individu karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dan menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana dalam membangun serta membina kehidupan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan upaya menyediakan akses bagi masyarakat untuk menempati dan memiliki rumah yang layak, terjangkau, serta berada dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah keterbatasan akses terhadap hunian layak bagi MBR merupakan isu sosial yang terjadi di Kota Pekanbaru. Proses urbanisasi yang cepat, penambahan jumlah penduduk yang signifikan, serta ketimpangan distribusi pendapatan faktor utama yang memicu munculnya kawasan permukiman kumuh yang jauh dari kriteria hunian yang sehat dan aman. Permasalahan terkait rumah tidak layak huni mencakup berbagai aspek, antara lain kondisi fisik bangunan yang tidak memadai, fasilitas sanitasi yang minim dan akses terbatas terhadap air bersih.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan swadaya masyarakat dalam membangun maupun memperbaiki rumah agar sesuai dengan standar kelayakan huni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

memegang peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan perumahan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mengurangi defisit ketersediaan perumahan (*backlog*) di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan rumah secara mandiri, dengan dukungan berupa bantuan dana serta pendampingan teknis. Stimulan rumah swadaya diwujudkan melalui program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang pelaksanaannya berlandaskan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan rumahnya sendiri.

Berdasarkan keputusan menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang besaran nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk peningkatan kualitas rumah pada lokasi reguler di luar wilayah Papua dan Maluku Utara per KK: Rp.20.000.000,00 (Rp17.500.000,00 untuk bahan bangunan + Rp2.500.000,00 untuk upah kerja).

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) setiap tahunnya menunjukkan variasi dalam jumlah penerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penetapan yang bersifat top-down, di mana keputusan penentuan alokasi dan penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penentuan tersebut umumnya mengacu pada usulan dan rekomendasi Komisi V DPR RI, yang berperan dalam menetapkan daerah prioritas penerima program berdasarkan pertimbangan kebijakan nasional dan ketersediaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki ruang terbatas dalam menentukan jumlah maupun sasaran penerima bantuan di wilayahnya. Akibatnya, implementasi program BSPS di tingkat daerah sering kali menghadapi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dan alokasi bantuan yang ditetapkan pusat.

Hingga saat ini belum banyak kajian ilmiah secara khusus membahas implementasi BSPS di Kota Pekanbaru secara menyeluruh, khususnya dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap kondisi sosial penerima manfaat secara naratif dan mendalam. Ketiadaan studi dengan fokus ini menyebabkan masih terbatasnya pemahaman terkait konteks pelaksanaan program dalam wilayah perkotaan di Pekanbaru.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola implementasi program BSPS, mengeksplorasi interaksi sosial antara pelaksana dan penerima bantuan serta merancang strategi pelaksanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kenyataan sosial di lapangan secara mendalam dan menyajikan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan program pada masa yang akan datang.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah kualitatif. Dilakukan dengan menggunakan analisis data dalam bentuk tulisan, di mana peneliti mengungkapkan fenomena yang terjadi sesuai kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kota ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat administrasi, ekonomi, dan kebijakan di Provinsi Riau, sekaligus menjadi salah satu wilayah yang secara aktif menerima dan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kota Pekanbaru menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan perumahan berbasis swadaya menghadapi tantangan dalam penerapan di wilayah urban dengan kompleksitas sosial ekonomi tinggi.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui *purposive sampling*, informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, data yang dimanfaatkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses interaksi langsung di lapangan. Teknik Pengumpulan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Observasi langsung ke lokasi penerima bantuan (observasi *non-partisipatif*). Pencatatan kondisi fisik rumah, interaksi sosial penerima bantuan, serta keterlibatan fasilitator. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau telah dipublikasikan, seperti laporan implementasi program BSPS di Kota Pekanbaru dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Kementerian PKP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator ini digunakan untuk menganalisis tingkat kejelasan tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sejauh mana tujuan tersebut dipahami oleh para pelaksana, serta bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan program di lapangan. Indikator standar dan sasaran kebijakan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru pada dasarnya telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Sasaran program juga secara jelas telah diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup berbagai unsur penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program, seperti ketersediaan anggaran, tenaga pelaksana, alokasi waktu, sarana pendukung, serta informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan program secara efektif. Aspek yang dikaji meliputi besaran bantuan yang diterima masyarakat, ketersediaan material bangunan, peran aktif dan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Pada indikator sumber daya implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan material bangunan, keterlambatan pelaksanaan, belum optimalnya administrasi distribusi bahan, serta perubahan kebutuhan pembangunan di lapangan. Ketersediaan anggaran menentukan jumlah masyarakat yang dapat menerima bantuan, sedangkan kecukupan sumber daya manusia menentukan kualitas pelaksanaan dan pengawasan program di lapangan.

Karakteristik atau Struktur Organisasi Pelaksana

Indikator ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, serta kapasitas organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru. pada indikator karakteristik struktur pelaksana, implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru telah memiliki sistem kelembagaan yang cukup baik melalui hubungan struktural dan koordinatif antar instansi. Meskipun demikian, upaya peningkatan koordinasi, pemahaman teknis, serta penguatan sinergi antar pelaksana masih perlu dilakukan. Langkah tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program agar dapat berlangsung secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru, disposisi pelaksana dapat dilihat dari bagaimana sikap, tanggung jawab, dan orientasi kerja para pelaksana program, baik dari unsur pemerintah, tenaga pendamping, maupun pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas di lapangan. Sikap pelaksana menjadi penting karena Program BSPS tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut proses pendampingan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pembangunan rumah penerima bantuan. Disposisi pelaksana sudah cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi efektivitas respons terhadap masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan proses teknis dalam pelaksanaan program. disposisi pelaksana tidak hanya diukur dari sikap ramah atau pelayanan administratif, tetapi juga dari kemampuan memahami dan menindaklanjuti kebutuhan nyata masyarakat penerima bantuan.

Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terbangun antara organisasi maupun para aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang berlangsung secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan persepsi yang selaras mengenai tujuan serta arah kebijakan yang akan dicapai, prosedur

pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Pada indikator komunikasi antar organisasi, implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru telah menunjukkan pola koordinasi yang cukup baik antar instansi pelaksana. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan sinkronisasi administrasi, percepatan alur komunikasi birokrasi, serta penguatan sosialisasi teknis agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program di lapangan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Melalui indikator ini, untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Pekanbaru memengaruhi implementasi Program BSPS, baik sebagai faktor pendukung maupun hambatan dalam mencapai tujuan program untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi rumah layak huni.

Pada indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru. Dari aspek sosial, hubungan antarwarga dan tingkat partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan program. Semangat gotong royong dan dukungan tokoh masyarakat membantu memperlancar proses pembangunan rumah, terutama bagi penerima bantuan yang memiliki keterbatasan swadaya. Namun demikian, masih ditemukan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan masyarakat akibat keterbatasan kuota bantuan serta perbedaan pemahaman mengenai kriteria penerima program.

Dari aspek ekonomi, mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bantuan BSPS yang bersifat stimulan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap harus menambah biaya pribadi, memanfaatkan bantuan keluarga, atau mengandalkan tenaga gotong royong agar pembangunan rumah dapat diselesaikan. Selain itu, meningkatnya harga bahan bangunan juga memengaruhi proses pembangunan rumah di lapangan.

Sementara itu, dari aspek politik, implementasi Program BSPS tidak terlepas dari adanya pengaruh aspirasi politik dan kepentingan pihak tertentu dalam pengusulan bantuan. Meskipun demikian, pihak pelaksana, khususnya TFL, tetap berupaya menjaga netralitas dan menjalankan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku agar bantuan tetap tepat sasaran. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik kondisi lingkungan masyarakat dan semakin kuat koordinasi serta netralitas pelaksana, maka implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru akan berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan program secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta masyarakat penerima bantuan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru.

Keterbatasan Anggaran Bantuan

Faktor penghambat implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru Adalah keterbatasan anggaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan BSPS yang diberikan sebesar Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan rumah layak huni. Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulan sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan rumah layak huni. Akibatnya, masyarakat masih harus menyediakan biaya tambahan secara mandiri agar pembangunan rumah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi penerima bantuan masih menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan rumah melalui Program BSPS. Program BSPS yang bersifat stimulan menyebabkan masyarakat tetap dituntut memiliki kemampuan swadaya, baik dalam bentuk dana tambahan, tenaga, maupun dukungan keluarga. Hal ini menjadi hambatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan finansial.

Kurangnya Sosialisasi dan Perbedaan Pemahaman Masyarakat

Sosialisasi Program BSPS belum berjalan secara merata di seluruh wilayah penerima bantuan. Beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai mekanisme program, tujuan bantuan, hingga hak dan kewajiban penerima bantuan. Bahkan terdapat masyarakat yang mengetahui program tersebut melalui pihak tertentu sebelum adanya sosialisasi resmi dari pemerintah atau pelaksana program.

Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat menyebabkan informasi yang diberikan tidak selalu dipahami dengan baik dalam satu kali sosialisasi. Kondisi ini menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, termasuk terkait penggunaan bantuan, proses pembangunan rumah, dan kriteria penerima bantuan. Oleh karena itu, TFL harus melakukan pendekatan secara berulang-ulang dari rumah ke rumah agar masyarakat lebih memahami pelaksanaan program.

Keterbatasan Sumber Daya Pendamping dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan Program BSPS, jumlah tenaga pendamping lapangan masih dinilai terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penerima bantuan di Kota Pekanbaru. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Beberapa masyarakat mengaku bahwa pendamping hanya datang pada tahap tertentu dan tidak selalu melakukan pemantauan secara intensif selama proses pembangunan rumah berlangsung.

Selain keterbatasan jumlah pendamping, hambatan juga terjadi dalam proses pengawasan teknis pembangunan rumah. Dalam beberapa kasus ditemukan perubahan ukuran atau desain rumah dari rencana awal sehingga memengaruhi penggunaan material dan anggaran. Keterbatasan pengawasan menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak selalu berjalan sesuai perencanaan awal, sehingga berpotensi menghambat penyelesaian program tepat waktu.

Kecemburuan Sosial dan Persepsi Ketidakadilan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kecemburuan sosial di masyarakat terkait penetapan penerima bantuan BSPS. Hal ini terjadi karena jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni masih lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan dari masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima program. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang transparan mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan.

Pengaruh Politik dan Intervensi Pihak Tertentu

Implementasi Program BSPS di Kota Pekanbaru menghadapi hambatan berupa pengaruh politik dan intervensi pihak tertentu, terutama karena program ini sering dikaitkan dengan jalur aspirasi politik. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengetahui atau memperoleh informasi program melalui pihak partai politik sebelum adanya sosialisasi resmi dari pemerintah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat kondusivitas pelaksanaan program di lingkungan Masyarakat. Meskipun pihak pelaksana khususnya TFL dan Balai, menyatakan tetap menjaga netralitas dalam proses verifikasi penerima bantuan, adanya intervensi politik tetap memengaruhi proses koordinasi di lapangan. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap objektivitas pelaksanaan program BSPS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, karena masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan koordinasi antar pelaksana, perbedaan pemahaman teknis, serta faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, meskipun tujuan program telah mulai tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek agar implementasi Program BSPS dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan tepat sasaran. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, seperti BP3KP Sumatera III, Satuan Kerja Provinsi, pemerintah daerah, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta masyarakat penerima bantuan.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan transparansi mengenai tujuan, mekanisme, serta kriteria penerima Program BSPS kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan potensi kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah perlu

meningkatkan jumlah dan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar proses pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi pelaksana serta penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan program lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun konflik sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), Tenaga Fasilitator Lapangan, serta seluruh informan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. (2024). *Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Pekanbaru Tahun 2024*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Judijanto, D., Chaniago, R., & Sepriano, R. (2025). *Reformulasi Kebijakan Publik Di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Rasionalitas Dan Partisipasi Sosial*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Realisasi Program BSPS Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2024). *Panduan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR. <https://Perumahan.Pu.Go.Id>
- Kementerian PUPR & BPS. (2024). *Data Penerima Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kompas86.Com. (2023, December 4). *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Kompas86.Com
- Laksono, M. Y. (2023, November 14). *Sebanyak 143.009 Unit Rumah Tak Layak Huni Beres Dibedah*. Kompas.Com. Kompas.Com
- Nuraisah, S. (2024). *Rasionalitas Komunikasi Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Prosiding COMICOS 2024, Hlm. 69. <https://www.researchgate.net/publication/391778322>

Wafa, A., Siswanto, D., & Angin, N. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Pemberdayaan Dan Keadilan Sosial. Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan Sosial*, 9(3), 233–248